

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Kemunculan wabah *Corona Virus Disease-19* (COVID-19) pertama kali di Wuhan, Provinsi Hubei, China telah menyebabkan 258 kasus ditemukan di wilayah tersebut. Selain Provinsi Hubei, 14 kasus juga tercatat di Provinsi Guangdong, lima kasus di Beijing dan satu kasus di Shanghai. Penyakit tersebut telah menyebar dengan cepat ke banyak negara dan menyebabkan dunia mengalami krisis global pada saat itu. Penyakit ini telah menyebar ke 90 persen negara di seluruh dunia dan pada Januari 2020 terdapat 278 kasus COVID-19 yang ditemukan di Tiongkok, dua di Thailand, satu di Jepang, dan satu di Korea Selatan (Bhalla et al., 2020; Hashim et al., 2021; Jafar et al., 2022). Secara tidak langsung, penyebaran COVID-19 telah membuat dunia berada pada titik balik yang besar, dimana memberikan dampak merugikan bagi banyak negara di seluruh dunia (Haba et al., 2022).

Sebagai salah satu negara yang mengisolasi dirinya dari interaksi dunia internasional, Demokrasi Republik Rakyat Korea atau Korea Utara menjadi salah satu negara yang juga terkena dampak dari penyebaran penyakit tersebut empat tahun lalu. Pada saat itu, kondisi perekonomian Korea Utara mengalami penurunan drastis karena perdagangan negara tersebut dengan Tiongkok terus merosot setiap tahunnya. Kantor Bea Cukai Tiongkok melaporkan perdagangan antara kedua negara pada saat itu mengalami penurunan dari USD 2,78 miliar (2019), USD 539,06 juta (2020), dan USD 318,04 juta (2021) (Lee, 2022). Menurut Prof. Kim Jung dari

University of North Korean Studies, mayoritas kelompok elit Korea Utara hidup dari kerjasama perdagangan dengan Tiongkok. Namun karena adanya penyebaran penyakit tersebut, telah mengakibatkan transaksi antara kedua negara mengalami penurunan secara mencolok (Kang, 2020).

Sementara itu, memburuknya ekonomi Korea Utara juga membuat praktek korupsi di negara tersebut ikut merebak. Berdasarkan laporan dari *Korean Central News Agency* (KCNA), praktek korupsi telah dilakukan oleh seorang pejabat di Pyongyang University of Medicine karena dugaan menerima suap (Shim, 2020). Selain dampak ekonomi, COVID-19 juga memberikan dampak sosial bagi keberadaan Korea Utara. Pandemi telah membuat Korea Utara semakin terisolasi, hal ini membuat Pemimpin Tertinggi Kim Jong-Un semakin merasa putus asa karena perbatasan negaranya dengan Tiongkok ditutup. Selain itu, kondisi cuaca buruk seperti topan dan banjir besar juga mengakibatkan persediaan bahan pangan di Korea Utara berkurang, sehingga negara tersebut harus bersiap menghadapi krisis pangan dan bencana kelaparan (Souza, 2021).

Jika melihat kembali sejarah Korea Utara sekitar tahun 1994 hingga 1998, bencana kelaparan yang pernah melanda negara tersebut telah menewaskan sekitar lima hingga sepuluh persen dari total seluruh penduduk Korea Utara yang ada pada saat itu. Peristiwa yang dikenal dengan istilah "*Arduous March*" ini telah memunculkan bibit-bibit jaringan pasar gelap lintas negara yang justru diikuti dengan meningkatnya aksi pembelotan di tengah-tengah rakyat Korea Utara. Berdasarkan laporan dari Kementerian Unifikasi Korea pada tahun 2017, diperkirakan terdapat sekitar 29.830 pembelot Korea Utara yang saat itu tinggal di Selatan. Jumlah

ini mengalami perkembangan yang begitu pesat sejak awal tahun 2000an (Hur, 2018). Hasil penelitian lainnya juga melaporkan jumlah pengungsi Korea Utara yang memasuki Korea Selatan pada Juni 2017 diperkirakan mencapai 30.805 orang. Presentase anak-anak dan remaja mencapai sekitar 16 persen, dimana banyak pengungsi Korea Utara memiliki pengalaman traumatis karena sering menyaksikan kematian akibat peristiwa-peristiwa yang sangat mengerikan (Park et al., 2017).

Semenjak system distribusi pangan di negara tersebut mengalami kegagalan dan menyebabkan banyak orang meninggal akibat kelaparan yang meluas, pemerintah Korea Utara tidak dapat lagi mempertahankan kekuasaan karena rakyat Korea Utara mulai mencari cara untuk bertahan hidup secara mandiri. Selain pembelotan rakyat Korea Utara ke Selatan berkembang pesat akibat situasi dalam negeri yang buruk, rakyat Korea Utara yang masih bertahan di negara tersebut mencoba menciptakan sarana hiburan bagi diri mereka sendiri sebagai bentuk pelarian dari kenyataan dengan menonton konten media asing, khususnya yang berasal dari Korea Selatan. Terbentuknya jaringan pasar gelap yang didukung oleh pedagang dan aktifitas penyelundupan lintas negara membuat sejumlah rakyat Korea Utara mulai dapat mengakses media asing yang berasal dari Tiongkok. Melalui pasar gelap, rakyat Korea Utara berhasil menonton konten media Korea Selatan dan mulai memiliki harapan di dalam diri mereka untuk memimpikan masa depan dan cara hidup yang lebih baik (Yoon, 2015).

Dengan memanfaatkan media selundupan berupa televisi dan radio asing yang juga menyertakan USB, MP3 player dan DVD yang berisikan konten-konten asing, rakyat Korea Utara mulai dapat

menonton drama dan film Korea Selatan. Selain itu, penyelundupan ponsel dari Tiongkok juga memberikan akses bagi rakyat Korea Utara untuk dapat berkomunikasi dengan kerabat mereka yang membelot ke Tiongkok dan Korea Selatan. Bahkan, ponsel juga dimanfaatkan oleh beberapa organisasi Korea Selatan untuk mengumpulkan informasi-informasi dari dalam Korea Utara (Kim, 2014).

Sebuah laporan wawancara dari beberapa saluran berita Korea Selatan pada tahun 2011 dengan seorang pembelot Korea Utara di Selatan memperlihatkan keinginannya untuk memiliki kehidupan di Korea Selatan setelah melihat gambaran masyarakat Korea Selatan yang sangat dikagumi ditampilkan dalam drama televisi Korea Selatan. Pembelot lainnya juga mengatakan bahwa kedatangannya ke Korea Selatan adalah karena keinginannya untuk menikmati buku, program televisi, dan film Korea Selatan secara bebas. Sebuah buku berjudul "*North Korean Show Box*" bahkan memberi gambaran jelas terkait ketertarikan masyarakat Korea Utara terhadap konten budaya Korea Selatan. Melalui sebuah inspeksi yang dilakukan pada tahun 2002, ditemukan 600 kg video Korea Selatan, compact disc, dan publikasi lainnya yang dikumpulkan dari mahasiswa Universitas Kim Il-Sung. Ini menunjukkan bahwa generasi muda Korea Utara sangat terpesona oleh budaya populer Korea Selatan bahkan sebelum budaya tersebut mencapai popularitas global (Chung, 2018).

Rakyat Korea Utara secara tidak langsung telah menciptakan budaya perlawanan di kalangan generasi muda sebagai bentuk pelarian dari korupsi yang merajalela dan kemiskinan berkepanjangan yang mereka alami. Kebebasan berekspresi yang

dilarang dan penindasan secara politik telah menciptakan sebuah tren yang menunjukkan adanya indicator perubahan sosial di tengah-tengah rakyat Korea Utara, sebuah negara yang dikenal sangat tertutup dari interaksi dunia internasional. Tren perubahan sosial tersebut ditunjukkan dengan banyaknya generasi muda Korea Utara saat ini yang menggunakan istilah-istilah bahasa Korea Selatan ketika mereka saling mengirimkan pesan, seperti “*saranghaeyo*” (aku menyayangimu), “*chal-ka*” (sampai jumpa), “*bye-bye*” (sampai jumpa) dan “*ty*” (singkatan dari Bahasa Inggris thank you) semenjak pengguna ponsel mengalami peningkatan signifikan belakangan ini. Pengaruh budaya Korea Selatan ternyata tidak hanya terbatas di kalangan generasi muda saja, sejumlah orangtua bahkan memberi nama anak mereka dengan unsur-unsur nama dari Korea Selatan. Istilah “*oppa*” (kakak laki-laki) dan “*dong-saeng*” (adik) juga menjadi sebuah fenomena yang tersebar luas di kalangan beberapa seniman dan generasi muda (Asia Press, 2021).

Semua pengaruh asing tersebut telah masuk ke dalam struktur sosial rakyat Korea Utara dan menjadi hal yang umum di tengah-tengah generasi muda. Namun sayangnya, masuknya pengaruh budaya Korea Selatan justru mendapatkan kritik keras dari pemimpin tertinggi Korea Utara. Melalui kritikan tersebut, Pemimpin Tertinggi Kim Jong-Un memberikan perintah langsung untuk membasmi “*puppet words and style*” yang tersebar di negaranya. Istilah puppet words and style yang dimaksud oleh Pemimpin Tertinggi Kim Jong-Un merujuk pada istilah “*saranghaeyo, chal-ka, bye-bye, oppa, dong-saeng dan ty*” yang kerap kali digunakan oleh masyarakat Korea Selatan sebagai bahasa keseharian mereka. Secara tidak langsung, puppet yang dimaksud merujuk pada Korea Selatan yang telah

dianggap sebagai boneka dari Amerika Serikat (AS). Selain itu, budaya asing juga dianggap bertentangan dengan ideologi *Ju Che* Korea Utara, yang artinya “*self-reliance* atau *mandiri*” tanpa bantuan dari masyarakat ataupun negara asing (Hudson, 2017).

Dengan memberikan kritikan keras dan perintah langsung untuk membasmi puppet words and style tersebut, pemerintah Korea Utara kemudian mengesahkan Undang-Undang Penghapusan Ideologi dan Budaya Reaksioner pada 04 Desember 2020 lalu. Melalui undang-undang (UU) tersebut, pemerintah Korea Utara berniat memperkuat control ideologi dan disiplin di kalangan rakyatnya terkait dengan kebijakan ideologi. UU tersebut kurang lebih menyebutkan larangan atas persebaran budaya luar negeri tertentu, khususnya yang berasal dari Korea Selatan. UU tersebut bahkan menguraikan kembali posisi ideologi, revolusi dan rakyat Korea Utara untuk mencegah penetrasi dan penyebaran ideologi budaya anti-sosialis agar tetap teguh mempertahankan ide, semangat dan budaya asli rakyat Korea Utara.

Dimulai dari titik inilah penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengapa konten budaya Korea Selatan yang memiliki nilai-nilai positif dan dimanfaatkan sebagai alat untuk menjalin hubungan diplomasi dengan negara lain justru mendapatkan kritikan keras dan penolakan langsung dari rezim Korea Utara. Tersebarnya dokumen rahasia yang diperoleh ASIAPRESS akan dianalisis lebih lanjut untuk menemukan alasan Korea Utara menganggap budaya asing, khususnya yang berasal dari Korea Selatan sebagai sebuah isu keamanan bagi Korea Utara.

## 1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah “mengapa budaya asing *Hallyu* atau Korean Wave dianggap sebagai sebuah isu keamanan bagi Korea Utara?”.

## 1.3 Kajian Pustaka

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa kajian pustaka seperti artikel untuk menggali dan lebih memahami isu terkait. Beberapa kajian pustaka dari penelitian sebelumnya yang memiliki hubungan antara budaya Korea Selatan dan Korea Utara menjadi acuan dan rujukan dari topik yang dibahas.

- a. Pertama, Ranjit Kumar Dhawan menuliskan artikel tentang “Korea’s cultural diplomacy: An analysis of *Hallyu* in India”. Artikel ini menganalisa usaha pemerintah Korea Selatan dalam menyebarkan popularitas produk budaya negaranya yang terkenal dengan istilah *Hallyu* atau Korean Wave di India. Lebih lanjut lagi, Ranjit membahas mengenai transformasi ekonomi Korea Selatan yang begitu pesat dari negara paling miskin hingga menjadi produsen dan eksportir paling besar di bidang otomotif dan teknologi. Dengan memanfaatkan peran pemerintah dalam menjalin hubungan diplomasi budaya bersama beberapa negara untuk mempromosikan produk-produk dari industry budaya, Korea Selatan berhasil mengejutkan Asia dan seluruh bagian dunia dengan kebangkitan negaranya secara global (Dhawan, 2017).
- b. Kedua, melalui artikelnya yang berjudul “Landscape of the minds of South and North Koreans: Unification perception, mutual recognition and the possibility of cultural integration”,

Lee Moonyoung membahas mengenai pentingnya penyatuan Korea Utara dan Selatan mengingat kedua negara telah hidup secara terpisah cukup lama dalam dua system berbeda dan saling bermusuhan. Namun, hasil analisa dari berbagai survey menunjukkan bahwa adanya kesenjangan yang begitu besar antara kedua negara. Dalam hal persepsi unifikasi, pengakuan dan penerimaan terhadap budaya satu sama lain, justru dikhawatirkan akan menimbulkan perselisihan dan konflik sosial diantara kedua bangsa menjadi semakin serius. Hal ini disebabkan oleh perbedaan pola pikir akan keduanya, dimana rakyat Korea Utara terpesona dengan fenomena *Hallyu*, sedangkan masyarakat Korea Selatan justru menghindari budaya Korea Utara (Lee, 2020).

- c. Ketiga, berbicara mengenai ketertarikan rakyat Korea Utara terhadap fenomena *Hallyu* yang telah menyebar di negaranya, Chung Ka Young mencoba menjelaskan melalui artikelnya yang berjudul “Media as soft power: The role of the South Korean media in North Korea”. Hasil penelitian dengan melakukan wawancara terhadap 127 pembelot dari Korea Utara (terdiri dari 46 laki-laki dan 81 perempuan dengan rentang usia 20 hingga 50 tahun keatas) menunjukkan bahwa adanya peningkatan proses konsumsi media Korea Selatan telah memotivasi rakyat Korea Utara untuk melakukan aksi pembelotan dan membekali mereka cara-cara beradaptasi untuk menjalani kehidupan di Selatan. Namun, daya tarik media ternyata tidak terlalu memberikan pengaruh positif terhadap proses adaptasi para pembelot Korea Utara di Selatan (Chung, 2018).



d. Kemudian, ada pula artikel yang berjudul “Forbidden audience: Media reception and social change in North Korea”. Melalui penelitian ini, Yoon Sunny melakukan wawancara dan mengobservasi para pengunjung Korea Utara terkait pengalaman mereka dalam menonton media Korea Selatan. Meskipun menonton media Korea Selatan dilarang keras dan dipandang sebagai aksi kejahatan oleh pihak pemerintah Korea Utara, namun fenomena ini menjadi sebuah tren di kalangan anak muda disana dan mereka berani mengambil resiko untuk ditangkap atau dikirim ke camp penjara. Kemiskinan yang berkepanjangan dan korupsi yang merajalela telah membuat rakyat Korea Utara menciptakan budaya perlawanan mereka sendiri dengan menonton televisi Korea Selatan sebagai sarana hiburan atau pelarian dari kenyataan. Hal ini menandakan bahwa terdapat perubahan social yang sangat besar di tengah-tengah Korea Utara, dimana dengan menonton fantasi visual media Korea Selatan telah memberikan sedikit harapan untuk masa depan mereka dan memungkinkan kaum muda Korea Utara untuk memimpikan cara alternatif memperoleh kehidupan yang lebih baik (Yoon, 2015).

Hasil pengolahan data dengan menggunakan kata kunci *Hallyu*, Korean Wave, South Korea dan North Korea menunjukkan bahwa budaya Korea Selatan memiliki nilai-nilai positif yang dimanfaatkan sebagai alat untuk menjalin hubungan diplomasi dengan negara lain. Namun, beberapa penelitian ilmiah lainnya menunjukkan bahwa persebaran budaya Korea Selatan di Korea Utara justru mendapatkan penolakan keras dari pihak pemerintah, sehingga tidak mengherankan apabila persebaran budaya Korea Selatan di negara

tersebut dilakukan secara ilegal dan banyak kalangan muda Korea Utara yang mengkonsumsi media Korea Selatan secara sembunyi-sembunyi. Berdasarkan perbandingan dari beberapa kajian pustaka inilah penulis memunculkan sebuah rumusan masalah terkait alasan *Hallyu* atau Korean Wave dianggap sebagai sebuah isu keamanan bagi Korea Utara.

#### **1.4 Kerangka Teori**

Pada akhir abad ke-20, berakhirnya Perang Dingin menandai munculnya perdebatan mengenai gagasan keamanan dalam lingkup hubungan internasional. Pendekatan studi keamanan tradisional yang awalnya berpusat pada keamanan negara dan stabilitas militer (Rythoven, 2016) mulai memperluas isu-isu keamanan baru yang memiliki potensi untuk mengganggu stabilitas sosial. Isu-isu tersebut meliputi: terorisme, konflik kekerasan, intervensi, perubahan iklim, migrasi, isu minoritas (termasuk gagasan budaya dan identitas), serta ancaman epidemiologis seperti Human Immunodeficiency Virus (HIV)-Acquired Immuno-Deficiency Syndrome (AIDS) (Baele & Jalea, 2023). Teori sekuritisasi berasal dari konstruksi sosial yang diperkenalkan oleh Copenhagen School pada tahun 1998. Pendekatan kritis dari teori ini berpendapat bahwa keamanan tidak selalu bersifat positif atau universal, ini bisa juga menjadi negatif tergantung pada konteks dan pokok bahasan (Baysal, 2020).

Teori sekuritisasi membuktikan bahwa kebijakan keamanan nasional suatu negara ditentukan oleh adanya aktor sekuritisasi yang terdiri dari para politisi dan pembuat keputusan. Pada dasarnya, isu-isu yang awalnya tidak mengancam bisa berubah menjadi serius setelah diartikulasikan sebagai “masalah” oleh para aktor sekuritisasi

(Hoffman, 2020). Untuk menganalisis bagaimana isu keamanan dikonstruksi, maka teori sekuritisasi berfokus pada tindak tutur (*act of speech*) dari aktor sekuritisasi untuk meyakinkan masyarakat bahwa isu keamanan ekstrim diintensifkan menjadi sebuah isu politik yang dicap *dangerous, menacing, threatening* dan *alarming* oleh actor sekuritisasi, yang kemudian ditampilkan dan diterima sebagai sebuah ancaman eksistensial (Lupovici, 2014). Pada intinya, teori sekuritisasi ini akan menunjukkan kepandaian berpidato dari actor sekuritisasi ketika bersatu dalam membingkai sebuah isu dan berusaha meyakinkan masyarakat untuk mengangkat isu tersebut ke ranah politik (Williams, 2003).

Untuk meyakinkan public dalam mengambil tindakan atau mengadopsi suatu kebijakan, aktor sekuritisasi harus menarik perhatian dengan membesar-besarkan isu keamanan dan tingkat ancaman melalui propaganda (Balzacq, 2015) sebagai upaya untuk menata kembali cara hidup yang adil dan masuk akal menurut versi mereka. Propaganda ini akan menciptakan kondisi kritis dimana tidak akan ada titik balik (*point of no return*) lagi jika masalah tersebut tidak segera diselesaikan, sehingga hal tersebut akan memunculkan kejadian luar biasa yang tidak ada artinya atau sudah tidak relevan lagi. Ide sentral dari sekuritisasi ini berupa hal-hal yang keberadaannya dirasa terancam dan perlu untuk dilindungi. Mereka juga mendukung pengambilan tindakan atau penerapan kebijakan sebagai tindakan pencegahan atau mengatasi ancaman tersebut (Taureck, 2006). Sebagai langkah akhir, maka akan ditawarkan solusi yang biasanya menggunakan intervensi militer (Lupovici, 2019). Hal ini digunakan oleh actor sekuritisasi untuk membantu

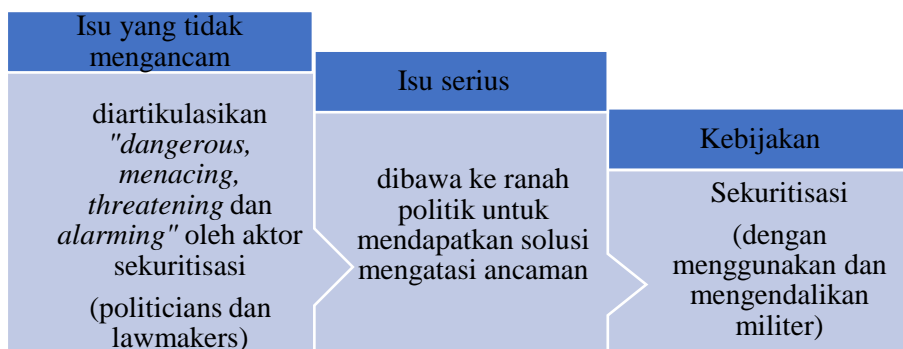
publik memahami ancaman yang dapat mengganggu keamanan dan objek yang harus dilindungi dari ancaman (Mukti, 2017).

Singkatnya, gagasan utama yang mendasari sekuritisasi adalah adanya isu penting yang dapat menarik perhatian public (Yilmaz & Shipoli, 2021) dan memungkinkan actor sekuritisasi menggunakan cara apapun yang mereka anggap paling tepat untuk menangani ancaman tersebut (Salter, 2019). Berdasarkan asumsi dari kelompok realisme dan neo-realisme, ketidakamanan berasal dari permasalahan spesifik yang mengancam dan membutuhkan alat kekerasan untuk mengatasinya. Oleh karena itu, Walt mendefinisikan studi keamanan sebagai studi yang berhubungan dengan ancaman, penggunaan, dan pengendalian kekuatan militer. Sekuritisasi yang berhasil akan menciptakan keamanan dan memberikan kekuasaan bagi actor sekuritisasi untuk mengadopsi sebuah kebijakan yang berbeda dengan kekuasaan yang dimilikinya. Namun dalam prakteknya, penerapan keamanan justru menimbulkan ketimpangan antara pihak yang menerima atau menikmati keamanan dengan pihak yang dirugikan pada saat bersamaan (Balzacq et al., 2016).

Menurut Buzan, Wæver dan Wilde (1998), mereka berpendapat bahwa permasalahan utama yang dianggap sebagai ancaman di sektor sosial berupa “migrasi, persaingan horizontal, dan persaingan vertikal”. Sebagai contoh, kita dapat mengilustrasikan ancaman dalam suatu masyarakat sebagai “Budaya A”. Dalam ancaman “migrasi”, munculnya “Budaya A” dari satu negara yang membanjiri “Budaya B” di negara lain akan berdampak besar pada kehidupan sosial dan struktur budaya secara perlahan. Bila hal ini terjadi dalam kurun waktu yang lama, maka akan membuat “Budaya B” berubah

akibat beralihnya budaya mayoritas. Sedangkan ancaman “Persaingan Horizontal” terjadi ketika “Budaya A” dari satu negara akan mengubah cara hidup mereka karena adanya pengaruh bahasa dan “Budaya B” yang lebih besar dari negara tetangga. Dengan kata lain, “Budaya A” mengalami perubahan dikarenakan merasa terintimidasi oleh budaya dan bahasa mayoritas. Terakhir, ancaman “Persaingan Vertikal” terjadi ketika masyarakat tidak lagi memandang dirinya sebagai komunitas dengan identitas “Budaya A” karena dua faktor, integrasi atau rencana separatis (Buzan et al., 1998).

**Gambar 1.1** Proses Sekuritisasi



Sumber: (diolah sendiri oleh penulis)

### 1.5 Hipotesis

Hipotesa yang ditarik dari penelitian ini adalah *Hallyu* atau Korean Wave telah dianggap bertentangan dengan ideologi *Ju Che* dan persebarannya di negara tersebut telah menyebabkan destabilisasi social-politik di tengah-tengah rakyat dan kalangan elite Korea Utara.

## 1.6 Metode Penelitian

Proses penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, dimana data-data yang dikumpulkan merupakan data sekunder dari e-book, artikel dari jurnal-jurnal bereputasi, website resmi milik pemerintah Korea Selatan, serta beberapa laporan resmi dari media online yang berada di Asia Timur. Data-data tersebut kemudian dianalisis dan dideskripsikan untuk mendapatkan penemuan baru dan diharapkan akan memberikan informasi bermanfaat untuk mendukung penjelasan dari penulisan tesis ini. Analisis ini bertujuan untuk menemukan jawaban terkait alasan Korea Utara menganggap budaya asing, khususnya *Hallyu* atau Korean Wave sebagai sebuah isu keamanan bagi Korea Utara.

## 1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis dari hasil penelitian yang dilakukan akan dibagi menjadi lima bab dan masing-masing bab akan membahas hal-hal sebagai berikut:

### Bab I **Pendahuluan**

Pada Bab I, penulis akan menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, kerangka teori, hipotesis, metode penelitian dan sistematika penelitian.

### Bab II **Perkembangan dan Pengaruh *Hallyu* atau South Korean Wave di Korea Utara**

Pada Bab II, penulis akan membahas tentang perkembangan konten budaya Korea Selatan di Korea Utara yang dilakukan melalui proses penyelundupan di sepanjang perbatasan China. Penulis juga memperoleh

beberapa penemuan yang menyebutkan bahwa budaya asing (khususnya yang berasal dari Korea Selatan) merupakan bentuk pengaruh anti-sosialis yang harus dilawan.

### Bab III ***Hallyu* atau South Koren Wave Sebagai Isu Keamanan Kawasan**

Pada Bab III, penulis akan menganalisis tentang pergeseran fenomena *Hallyu* atau Korean Wave yang tersebar di Korea Utara menjadi sebuah isu keamanan. Selain itu, penulis juga akan menjelaskan alasan budaya asing telah dianggap bertentangan dengan ideologi yang berada di negara tersebut. Hal ini akan dianalisis dengan menggunakan teori sekuritisasi, dimana actor sekuritisasi memegang kendali atas berkembangnya isu biasa menjadi isu politik dengan memberikan kritikan keras dan perintah langsung agar isu tersebut segera diselesaikan demi mengamankan kepentingannya.

### Bab IV **Respon Pemerintah Korea Utara Terhadap Ancaman *Hallyu* atau South Korean Wave**

Pada Bab IV, penulis akan membahas mengenai pengesahan Undang-Undang Penghapusan Ideologi dan Budaya Reaksioner sebagai hasil yang diperoleh dari proses sekuritisasi. Pasal-pasal, larangan dan hukuman juga akan dibahas, dimana dengan UU tersebut pemerintah Korea Utara berniat memperkuat control ideologi demi mempertahankan ide, semangat revolusi dan budaya asli rakyat Korea Utara.

## Bab V **Kesimpulan**

Pada Bab V, penulis akan merangkum penemuan dari penelitian yang dilakukan, sehingga dapat menyajikan jawaban secara singkat dari pokok permasalahan yang diajukan.